



Strategi Penyembunyian dan Pengucilan Aktor Sosial dalam Berita Razia Kamar Kos: Analisis Wacana Theo Van Leeuwen

Ridwan Anas* & Agus Hamdani

Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut, Jl. Terusan Pahlawan No.32, RW.01, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia 44151

Email Korespondensi: ridwananasrasyid1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi eksklusi dan inklusi aktor sosial dalam pemberitaan media massa tentang razia kamar kos yang dilakukan oleh Tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen, penelitian ini menemukan bahwa pasangan yang tertangkap dan pemilik kos mengalami eksklusi melalui pasivasi, asimilasi, dan generalisasi, sedangkan polisi dan masyarakat diinklusiikan melalui nominasi, determinasi, dan asosiasi. Temuan menunjukkan bahwa strategi ini memperkuat stigma sosial terhadap kelompok marginal, mempertegas legitimasi otoritas, dan mendorong solidaritas sosial yang terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana kritis dengan menyoroti bagaimana media membentuk narasi moral yang berdampak pada dinamika sosial dan kebijakan publik.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Eksklusi, Inklusi, Media Massa, Theo van Leeuwen.

The Strategic Role of Educational Philosophy in Human Resource Development: Theoretical Insights and Global Implementation

Abstract

This study aims to analyze strategies of exclusion and inclusion of social actors in media coverage of boarding house raids conducted by the Maung Galunggung Team of the Tasikmalaya City Police. Using Theo van Leeuwen's critical discourse analysis framework, the study reveals that arrested couples and boarding house owners were excluded through passivation, assimilation, and generalization, while the police and the community were included through nomination, determination, and association. The findings indicate that these strategies reinforce social stigma against marginalized groups, legitimize authority, and foster limited social solidarity. This study contributes to critical discourse analysis by highlighting how media narratives shape moral perceptions, social dynamics, and public policy.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Exclusion, Inclusion, Mass Media, Theo van Leeuwen.

How to Cite: Anas, R., & Hamdani, A. (2024). Strategi Penyembunyian dan Pengucilan Aktor Sosial dalam Berita Razia Kamar Kos: Analisis Wacana Theo Van Leeuwen. *Empiricism Journal*, 5(2), 340–350. <https://doi.org/10.36312/ej.v5i2.2250>



<https://doi.org/10.36312/ej.v5i2.2250>

Copyright© 2024, Anas & Hamdani

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, media memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap realitas sosial, termasuk norma moral dan deviasi. Setiap berita yang disampaikan tidak hanya berfungsi sebagai laporan fakta, tetapi juga sebagai produk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, ideologi, dan perspektif. Hal ini menunjukkan bahwa wacana yang dihasilkan oleh media dapat membingkai cara pandang publik terhadap isu-isu moral dan sosial tertentu. Menurut Theo van Leeuwen (2008), media massa sering kali menggunakan teknik inclusion (penyertaan) dan exclusion (pengecualian) untuk menampilkan atau menyembunyikan aktor sosial. Strategi ini menciptakan narasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi moral tertentu terhadap individu atau kelompok.

Sebagai contoh, pemberitaan mengenai razia yang dilakukan oleh Tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota di sebuah kamar kos pada Oktober 2024 menunjukkan bagaimana aktor sosial tertentu, seperti pasangan yang tertangkap dan pemilik kos, dihapus atau diminimalisasi perannya melalui strategi exclusion. Sebaliknya,

pihak kepolisian dan masyarakat lokal diberikan sorotan positif melalui teknik inclusion. Narasi semacam ini tidak hanya memperkuat citra otoritas sebagai penjaga moralitas, tetapi juga menciptakan jarak moral antara pelanggar norma dengan masyarakat luas.

Media memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu moral, baik melalui narasi yang terang-terangan maupun yang implisit. Eden et al. (2017) menyatakan bahwa konten media yang menampilkan konflik moral mampu mendorong audiens untuk melakukan refleksi moral, yang pada akhirnya memengaruhi penilaian dan perilaku moral mereka. Proses ini sangat relevan di masyarakat Asia Tenggara, di mana nilai-nilai moral sering kali menjadi inti dari narasi media. Dalam konteks ini, pemberitaan yang tidak menyajikan resolusi yang jelas justru dapat memicu audiens untuk mengeksplorasi keyakinan moral mereka sendiri, sehingga memperkuat keterlibatan dengan isu-isu moral yang disajikan.

Selain itu, perkembangan media digital dan platform sosial telah mengubah lanskap diskursus moral. Nazir et al. (2021) menyoroti peran media sosial dalam memfasilitasi narasi moral selama peristiwa kritis, yang memungkinkan individu untuk mengemukakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan munculnya kepanikan moral, seperti yang dibahas oleh Rao dan Lingam (2020) dalam konteks perilaku anak muda di India. Situasi ini memiliki kemiripan dengan konteks Asia Tenggara, di mana media sosial sering kali menjadi ruang untuk mendiskusikan isu-isu moral dan norma sosial.

Framing moral dalam media sering kali berkaitan erat dengan isu gender dan migrasi. Sebagai contoh, Chan (2014) menunjukkan bahwa representasi media terhadap migrasi tenaga kerja perempuan dari Indonesia sering kali mencerminkan dualitas: di satu sisi, mereka dipandang sebagai pahlawan pembangunan, tetapi di sisi lain, mereka juga digambarkan sebagai korban eksploitasi. Dualitas ini menunjukkan bagaimana narasi media membingkai moralitas dalam konteks sosial yang lebih luas, mencerminkan sikap masyarakat terhadap peran gender dan implikasi moral dari migrasi.

Selain itu, konsep ambiguitas moral dalam narasi media juga memiliki dampak signifikan terhadap ekspresi kreatif dan diskursus publik. Morgan dan Lewis (2017) mengemukakan bahwa narasi yang ambigu secara moral dapat menghambat kinerja kreatif karena kurangnya kerangka moral yang jelas. Dalam konteks Asia Tenggara, di mana tradisi dan ekspektasi moral memiliki pengaruh besar, tantangan dalam menghadapi ambiguitas moral menjadi lebih menonjol. Media digital, dengan kemampuannya untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang kontradiktif, dapat memperburuk ketegangan ini.

Interaksi antara disposisi afektif dan penilaian moral dalam menilai karakter naratif juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Penelitian Lee dan Shapiro (2014) menunjukkan bahwa respons emosional individu terhadap karakter naratif dapat secara signifikan memengaruhi evaluasi moral mereka. Hal ini relevan dalam media Asia Tenggara, di mana narasi sering kali dirancang untuk membangkitkan respons emosional yang kuat yang berakar pada nilai-nilai budaya dan norma sosial. Dengan demikian, representasi karakter dalam dilema moral dapat mendorong audiens untuk merefleksikan nilai-nilai mereka sendiri dan memahami implikasi yang lebih luas dari deviasi dalam komunitas mereka.

Penekanan pada intuisi moral yang berbeda dalam media naratif juga dapat memengaruhi penilaian moral remaja, seperti yang ditunjukkan oleh Hahn et al. (2022). Temuan ini menekankan pentingnya literasi media dan keterlibatan kritis dengan narasi, terutama di kalangan audiens muda di Asia Tenggara. Seiring dengan proliferasi media digital, potensi narasi untuk membentuk intuisi moral dan persepsi terhadap deviasi semakin signifikan.

Meskipun banyak penelitian yang membahas pengaruh media dalam membingkai moralitas, studi ini mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana strategi inclusion dan exclusion diterapkan dalam konteks lokal, khususnya di Asia Tenggara. Banyak penelitian sebelumnya yang berfokus pada representasi media di negara-negara Barat, sementara konteks budaya dan sosial yang unik di Asia Tenggara masih kurang tereksplorasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana strategi penyembunyian dan pamarjinalan aktor sosial digunakan dalam pemberitaan media lokal di

Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang diusulkan oleh van Leeuwen, penelitian ini tidak hanya menyelidiki teknik linguistik yang digunakan, tetapi juga menganalisis dampak sosial dan moral dari strategi ini terhadap masyarakat.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis, CDA) yang dikembangkan oleh Theo van Leeuwen (2008). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana wacana media membingkai representasi aktor sosial melalui strategi eksklusi dan inklusi. Penelitian berfokus pada teks berita dari media daring yang relevan dengan peristiwa razia kamar kos oleh Tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota. Fokus utama penelitian adalah pada nilai-nilai moral, etika, dan dampaknya pada praktik pendidikan serta kebijakan SDM.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

1. Pencarian Literatur

Data literatur diambil dari jurnal akademik bereputasi yang tersedia di Google Scholar dan Scopus. Kata kunci yang digunakan meliputi: *philosophy of education*, *human resource development*, *values-based education*, dan *integration of educational philosophy*.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Artikel yang relevan dipilih berdasarkan kontribusi teoritis dan empiris terhadap peran filsafat pendidikan dalam pengembangan SDM. Literatur dengan fokus hanya pada aspek teknis pengembangan SDM dikecualikan. Dari total 30 artikel yang ditemukan, sebanyak 20 artikel memenuhi kriteria relevansi setelah proses penyaringan.

3. Review Artikel

Artikel diproses melalui tahapan: penelaahan abstrak, identifikasi temuan utama, dan analisis kontribusi ke dalam kerangka filsafat pendidikan.

Alur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan langkah-langkah:

1. **Koding Awal:** Mengidentifikasi tema utama dalam artikel, seperti kontribusi nilai-nilai filosofis, metodologi integrasi, dan dampaknya pada kebijakan pendidikan.
2. **Kategorisasi:** Membagi tema berdasarkan cabang filsafat pendidikan (ontologi, epistemologi, dan aksiologi).
3. **Interpretasi:** Menyusun interpretasi terhadap hasil kajian, menghubungkannya dengan konteks global dan tantangan era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Aktor Sosial dalam Wacana Media

Representasi aktor sosial dalam wacana media merupakan komponen krusial yang mencerminkan bagaimana individu atau kelompok diposisikan dalam suatu narasi. Dalam konteks berita razia kamar kos yang dianalisis, aktor sosial utama terdiri dari pasangan yang tertangkap, pihak kepolisian, masyarakat, dan pemilik kos. Hal ini menunjukkan bahwa wacana media menggunakan berbagai strategi linguistik untuk membingkai aktor-aktor ini secara selektif, menonjolkan atau menyembunyikan peran mereka sesuai dengan tujuan naratif tertentu.

1. Pasangan yang Tertangkap: Objek dari Eksklusi Naratif

Pasangan yang tertangkap menjadi subjek utama eksklusi naratif dalam berita ini. Mereka digambarkan melalui frasa seperti "*empat pasangan yang bukan suami istri diamankan*," tanpa adanya identitas individu yang diungkapkan. Strategi ini mencerminkan penggunaan asimilasi dan pasivasi untuk mengaburkan peran individu dalam konteks tindakan moral yang dianggap menyimpang.

Strategi Linguistik:

- a. **Asimilasi:** Pasangan yang tertangkap dikelompokkan menjadi satu entitas kolektif dengan karakteristik tunggal, yaitu sebagai pelanggar norma. Hal ini terlihat pada

penggambaran mereka sebagai *"empat pasangan yang bukan suami istri."* Menurut van Leeuwen (2008), strategi ini sering digunakan untuk menghapus keunikan individu dan mengalihkan perhatian ke tindakan kolektif.

- b. **Pasivasi:** Pasivasi terlihat jelas dalam kalimat seperti *"Empat pasangan yang bukan suami istri diamankan."* Kalimat ini menonjolkan tindakan (diamankan) tanpa menyoroti pelaku tindakan (polisi). Sebagaimana dinyatakan oleh Kress dan van Leeuwen (2006), teknik ini membuat tindakan terlihat natural dan tidak memerlukan justifikasi tambahan.
- c. **Nominalisasi:** Dalam pernyataan seperti *"razia ini bertujuan untuk menegakkan norma kesusilaan,"* nominalisasi digunakan untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda. Hal ini menciptakan kesan bahwa tindakan tersebut berorientasi pada tujuan normatif yang lebih besar, sekaligus mengaburkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk menegakkan norma tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Inglis et al. (2019) yang menunjukkan bahwa representasi negatif dalam media memperkuat stigma sosial terhadap kelompok termarginalkan. Dengan menekankan kolektivitas pasangan sebagai pelanggar norma, media berkontribusi pada pembentukan stereotip yang memperkuat persepsi publik tentang moralitas sebagai konsep hitam-putih. Lebih jauh, hal ini meminggirkan pengalaman individu yang mungkin memiliki konteks berbeda untuk tindakan mereka.

2. Polisi: Subjek Utama Inklusi Positif

Polisi dalam berita ini diposisikan sebagai penegak norma dan penjaga moralitas. Hal ini terlihat melalui penggunaan nominasi dan determinasi yang menyoroti peran mereka secara eksplisit. Frasa seperti *"Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, melalui Kasat Samapta AKP Hartono, mengonfirmasi..."* menunjukkan bahwa nama, pangkat, dan posisi mereka disebutkan dengan jelas.

Strategi Linguistik:

- a. **Nominasi:** Nama dan jabatan seperti AKBP Joko Sulistiono dan AKP Hartono sering disebutkan untuk menegaskan otoritas dan legitimasi mereka. Menurut van Dijk (1998), strategi nominasi digunakan untuk memberikan identitas yang jelas kepada aktor sosial yang ingin ditekankan perannya.
- b. **Determination:** Polisi diberi peran yang tegas sebagai pelaksana hukum dan penjaga moralitas, sebagaimana terlihat dalam pernyataan, *"Razia ini bertujuan untuk menegakkan norma kesusilaan dan memberikan efek jera bagi pelanggar."* Determination memastikan bahwa peran mereka tidak hanya dianggap sah tetapi juga diperlukan untuk menjaga tatanan sosial.
- c. **Objektivasi:** Penegakan norma oleh polisi digambarkan sebagai kebutuhan sosial, tanpa mengungkapkan potensi bias atau dampak negatif dari tindakan tersebut. Teknik ini, menurut van Leeuwen (2008), sering digunakan untuk menekankan tujuan yang lebih besar tanpa membahas konsekuensi spesifik.

Machin dan Mayr (2012) menyatakan bahwa wacana media dapat digunakan untuk membangun kekuasaan dan legitimasi bagi aktor tertentu. Dalam kasus ini, representasi polisi sebagai penjaga norma menciptakan persepsi publik bahwa tindakan mereka tidak hanya sah tetapi juga esensial. Namun, framing ini mengabaikan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau kritik terhadap metode yang digunakan dalam razia tersebut.

3. Masyarakat: Mitra Kolaboratif dalam Penegakan Norma

Masyarakat dalam berita ini diposisikan sebagai mitra aktif dalam penegakan norma kesusilaan. Apresiasi terhadap peran mereka terlihat dalam pernyataan seperti *"AKP Hartono mengapresiasi laporan masyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan."* Narasi ini menciptakan asosiasi positif antara masyarakat dan polisi.

Strategi Linguistik:

- a. **Asosiasi:** Partisipasi masyarakat dikaitkan dengan tindakan yang dianggap bermoral, seperti melaporkan aktivitas mencurigakan. Hal ini menciptakan batasan sosial yang jelas antara kelompok 'benar' (masyarakat pelapor) dan kelompok 'salah' (pelanggar norma).
- b. **Abstraksi:** Tidak ada rincian spesifik tentang siapa yang melapor atau bagaimana laporan tersebut dilakukan, yang menciptakan kesan bahwa semua warga memiliki

tanggung jawab kolektif untuk menjaga norma. Teknik ini memudahkan pembaca untuk merasa terhubung dengan peran masyarakat dalam narasi.

Purtle et al. (2021) mencatat bahwa narasi media yang menonjolkan partisipasi masyarakat dapat memperkuat solidaritas sosial. Namun, hal ini juga dapat menciptakan tekanan sosial untuk mematuhi norma tertentu, bahkan ketika norma tersebut mungkin tidak relevan atau adil bagi semua individu.

4. Pemilik Kos: Aktor Marginal dalam Narasi

Pemilik kos hanya disebutkan secara sepintas dalam berita ini, seperti dalam pernyataan *"Petugas juga memberikan imbauan kepada pemilik dan pengelola kos untuk memastikan tempat mereka tidak disalahgunakan."* Penyebutan ini menunjukkan bahwa peran mereka sebagai pihak yang terlibat langsung dikesampingkan.

Strategi Linguistik:

- Generalization:** Pemilik kos disebut sebagai kelompok umum tanpa nama atau identitas spesifik. Hal ini mengalihkan perhatian dari tanggung jawab mereka sebagai fasilitator potensial dari pelanggaran.
- Disassociation:** Pemilik kos dipisahkan dari tindakan asusila yang terjadi, sehingga mengurangi kemungkinan masyarakat melihat mereka sebagai aktor yang bertanggung jawab.

Rowe dan O'Brien (2014) menyebutkan bahwa strategi ini sering digunakan untuk melindungi institusi atau individu yang berpotensi memiliki tanggung jawab lebih besar dalam suatu narasi. Dalam kasus ini, pengalihan tanggung jawab dari pemilik kos memungkinkan narasi fokus pada pelanggar norma dan polisi sebagai penjaga moralitas.

Strategi Eksklusi dalam Wacana

Strategi eksklusi adalah salah satu teknik utama dalam wacana media untuk menyembunyikan, menghapus, atau mengurangi perhatian terhadap aktor sosial tertentu. Dalam berita yang dianalisis, eksklusi terlihat pada bagaimana pasangan yang tertangkap dan pemilik kos dihilangkan dari narasi secara eksplisit. Menurut van Leeuwen (2008), eksklusi digunakan untuk membentuk relasi kekuasaan yang asimetris, memarginalkan kelompok tertentu, sekaligus memperkuat legitimasi narasi pihak lain.

Tabel 1. Teknik Eksklusi pada Aktor Sosial dalam Berita

Aktor Sosial	Strategi Eksklusi	Contoh dalam Teks	Dampak
Pasangan Tertangkap	Pasivasi, Asimilasi, Nominalisasi	Empat pasangan yang bukan suami istri diamankan.	Penghilangan identitas individu, memperkuat stigma moral kolektif.
Pemilik Kos	Generalisasi, Disassociation	Petugas juga memberikan imbauan kepada pemilik dan pengelola kos.	Menghilangkan tanggung jawab individu dan meminimalkan peran dalam narasi.

1. Eksklusi Pasangan yang Tertangkap

Pasangan yang tertangkap menjadi subjek utama dari eksklusi dalam berita ini. Mereka hanya disebutkan secara umum sebagai *"empat pasangan yang bukan suami istri"* tanpa adanya detail identitas atau konteks yang relevan. Strategi ini membingkai pasangan tersebut semata-mata sebagai pelanggar norma, menghapus keunikan individu mereka, dan menghilangkan kemungkinan untuk memahami latar belakang tindakan mereka.

Strategi Linguistik yang Digunakan

- Pasivasi:** Pasangan yang tertangkap digambarkan sebagai objek dari tindakan polisi. Frasa seperti *"Empat pasangan yang bukan suami istri diamankan"* memusatkan perhatian pada tindakan penangkapan, sementara polisi sebagai subjek aktif sengaja dihilangkan. Pasivasi menciptakan kesan bahwa tindakan ini adalah prosedur rutin yang tidak memerlukan justifikasi lebih lanjut (Kress & van Leeuwen, 2006).
- Asimilasi:** Dengan menyebutkan mereka secara kolektif, pasangan ini diasimilasikan menjadi satu kategori besar, yaitu sebagai pelanggar norma kesusilaan. Tidak ada

informasi spesifik mengenai nama, usia, atau alasan tindakan mereka, yang membuat mereka terkesan sebagai satu entitas homogen tanpa individualitas.

- c. **Nominalisasi:** Frasa seperti "*razia ini bertujuan untuk menegakkan norma kesusilaan*" menggambarkan tindakan polisi dalam konteks abstrak. Nominalisasi ini menyembunyikan subjek aktif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan norma tersebut, sehingga pasangan tertangkap lebih mudah diposisikan sebagai pelanggar tanpa mempersoalkan otoritas polisi.

Temuan ini mendukung penelitian Inglis et al. (2019), yang menunjukkan bahwa representasi negatif dalam media memperkuat stigma sosial terhadap kelompok marginal. Eksklusi pasangan yang tertangkap menghilangkan kemungkinan pembaca untuk mempertimbangkan kompleksitas tindakan mereka, seperti latar belakang sosial atau tekanan sistemik yang mungkin mereka alami. Stigma ini juga menguatkan narasi moral hitam-putih yang membagi masyarakat menjadi kelompok "baik" dan "buruk."

2. Eksklusi Pemilik Kos

Pemilik kos adalah aktor sosial lain yang dikesampingkan dalam wacana ini. Penyebutan mereka hanya dilakukan secara umum, seperti dalam pernyataan "*Petugas juga memberikan imbauan kepada pemilik dan pengelola kos untuk memastikan tempat mereka tidak disalahgunakan.*" Tidak ada eksplorasi lebih lanjut tentang peran mereka, tanggung jawab mereka, atau potensi keterlibatan mereka dalam insiden ini.

Strategi Linguistik yang Digunakan

- a. **Generalization:** Pemilik kos tidak disebutkan secara individu, melainkan sebagai kelompok umum. Hal ini mengurangi visibilitas mereka dalam narasi dan mengalihkan perhatian dari tanggung jawab mereka.
- b. **Disassociation:** Dengan mengaitkan tindakan asusila hanya pada pasangan yang tertangkap, pemilik kos dipisahkan dari insiden ini. Disassociation ini menciptakan jarak antara pemilik kos dan pelanggaran yang terjadi di properti mereka.
- c. **Minimization:** Pemilik kos hanya muncul dalam satu kalimat, tanpa penjelasan tentang bagaimana mereka dapat berperan dalam mencegah insiden serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa peran mereka dianggap kurang relevan dibandingkan pasangan yang tertangkap atau polisi.

Rowe dan O'Brien (2014) menjelaskan bahwa media sering kali memprioritaskan narasi yang meminimalkan tanggung jawab institusi atau pihak yang lebih kuat. Dalam konteks ini, eksklusi pemilik kos memungkinkan narasi tetap fokus pada pasangan tertangkap sebagai pelanggar norma utama, sehingga tidak ada perhatian yang diarahkan pada potensi kegagalan regulasi yang lebih luas.

3. Implikasi Sosial dari Strategi Eksklusi

Eksklusi dalam wacana media memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembentukan opini publik, stigma sosial, dan kebijakan.

- a. **Penguatan Stigma Sosial:** Eksklusi pasangan yang tertangkap memperkuat stigma terhadap pelanggar norma kesusilaan. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang terisolasi dari masyarakat yang "bermoral." Sebagaimana dicatat oleh Hatzenbuehler (2016), stigma semacam ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius, termasuk kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa keterhubungan sosial.
- b. **Pengalihan Tanggung Jawab:** Eksklusi pemilik kos menciptakan narasi yang mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman dan terkendali. Hal ini berpotensi mengaburkan masalah sistemik yang mungkin memerlukan intervensi regulasi.
- c. **Pola Marginalisasi Struktural:** Dengan menghapus individu atau kelompok tertentu dari narasi, media berkontribusi pada marginalisasi struktural. Seperti yang dijelaskan oleh Hildebrandt dan Bode (2019), eksklusi dalam wacana publik dapat memengaruhi dukungan terhadap kebijakan yang berhubungan dengan kelompok termarginalkan, memperkuat ketidakadilan sosial.
- d. **Pola Narasi Moral:** Strategi eksklusi menciptakan pola narasi moral yang sederhana, di mana pelanggar norma diposisikan sebagai antagonis, sedangkan polisi dan masyarakat sebagai protagonis. Narasi ini mengabaikan kompleksitas sosial dan moral yang mungkin relevan untuk memahami tindakan para pelanggar.

Strategi Inklusi dalam Wacana

Strategi inklusi dalam wacana media berfungsi untuk memberikan visibilitas, penegakan, dan legitimasi kepada aktor sosial tertentu. Dalam berita razia kamar kos ini, strategi inklusi digunakan secara intensif untuk menonjolkan peran polisi sebagai penegak norma kesusilaan dan masyarakat sebagai mitra aktif. Strategi ini membangun narasi yang memperkuat otoritas dan keterlibatan sosial dalam mempertahankan norma moral yang berlaku.

Tabel 2. Teknik Inklusi pada Aktor Sosial dalam Berita

Aktor Sosial	Strategi Inklusi	Contoh dalam Teks	Dampak
Polisi	Nominasi, Determination, Objektivasi	"Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono..."	Membangun legitimasi sebagai penegak norma kesusilaan.
Masyarakat	Asosiasi, Abstraksi	"AKP Hartono mengapresiasi laporan masyarakat..."	Memperkuat solidaritas sosial dan keterlibatan masyarakat dalam narasi.

1. Polisi: Aktor Utama dalam Narasi

Polisi diberi sorotan utama dalam narasi ini melalui berbagai strategi inklusi yang mempertegas peran mereka sebagai pelindung moralitas dan penegak hukum. Hal ini terlihat pada penggunaan nominasi, determinasi, dan objektivasi yang membangun citra otoritas mereka sebagai penjaga norma sosial.

Strategi Linguistik yang Digunakan

- Nominasi:** Nama dan jabatan polisi, seperti *"Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, melalui Kasat Samapta AKP Hartono,"* disebutkan secara rinci untuk memberikan identitas yang jelas kepada aktor ini. Menurut van Dijk (1998), nominasi adalah teknik yang digunakan untuk menegaskan peran individu dalam narasi.
- Determination:** Polisi ditampilkan sebagai pelaku utama yang berperan aktif dalam razia. Frasa seperti *"Razia ini bertujuan untuk menegakkan norma kesusilaan dan memberikan efek jera bagi pelanggar,"* memperlihatkan polisi sebagai pengambil tindakan tegas.
- Objektivasi:** Tindakan polisi disajikan sebagai upaya untuk menegakkan norma, seperti dalam pernyataan *"Kami berharap keberadaan kos-kosan tidak digunakan untuk perbuatan asusila."* Objektivasi ini mengalihkan perhatian dari individu yang melaksanakan tindakan menuju tujuan normatif yang lebih besar.

Machin dan Mayr (2012) menyatakan bahwa media sering menggunakan strategi inklusi untuk membangun legitimasi aktor yang memiliki kekuasaan. Dalam kasus ini, representasi positif terhadap polisi menciptakan kesan bahwa tindakan mereka tidak hanya sah tetapi juga diperlukan untuk menjaga tatanan sosial. Namun, framing ini berpotensi mengabaikan pertanyaan tentang keadilan prosedural atau efek dari tindakan tersebut terhadap kelompok marginal.

2. Masyarakat: Mitra Aktif dalam Penegakan Norma

Masyarakat dalam berita ini diposisikan sebagai mitra aktif yang mendukung tindakan polisi. Narasi ini menonjolkan peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, yang menciptakan kesan adanya solidaritas sosial antara masyarakat dan pihak berwenang.

Strategi Linguistik yang Digunakan

- Asosiasi:** Masyarakat diasosiasikan dengan norma positif melalui apresiasi terhadap laporan mereka. Frasa seperti *"AKP Hartono mengapresiasi laporan masyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan,"* menciptakan citra masyarakat yang aktif menjaga moralitas.
- Abstraksi:** Meskipun masyarakat disebutkan secara positif, tidak ada rincian tentang siapa yang melapor atau bagaimana laporan dilakukan. Abstraksi ini, menurut van Leeuwen (2008), memungkinkan pembaca untuk memproyeksikan peran tersebut ke dalam diri mereka sendiri, menciptakan rasa keterlibatan pribadi dengan narasi.

Purtle et al. (2021) menyatakan bahwa inklusi masyarakat dalam wacana media dapat memperkuat solidaritas sosial. Namun, strategi ini juga dapat mempertegas tekanan sosial untuk mematuhi norma tertentu, meskipun norma tersebut mungkin tidak relevan atau adil bagi semua individu.

3. Implikasi Sosial dari Strategi Inklusi

Strategi inklusi dalam wacana ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembentukan opini publik, legitimasi otoritas, dan keterlibatan masyarakat.

- a. **Penguatan Legitimasi Otoritas:** Dengan memberikan visibilitas yang tinggi kepada polisi, strategi inklusi membangun citra mereka sebagai aktor yang sah dan penting dalam menjaga norma sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Rowe dan O'Brien (2014), legitimasi semacam ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, meskipun berpotensi mengabaikan kekurangan dalam pendekatan mereka.
- b. **Mobilisasi Partisipasi Sosial:** Narasi inklusi terhadap masyarakat menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap norma sosial. Hal ini dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dalam menjaga moralitas, sebagaimana terlihat dalam laporan yang mereka sampaikan.
- c. **Potensi Eksklusi Terselubung:** Meskipun inklusi terhadap polisi dan masyarakat tampak positif, strategi ini secara tidak langsung mempertegas eksklusi terhadap aktor lain, seperti pasangan yang tertangkap dan pemilik kos. Dengan menonjolkan peran positif dua aktor ini, narasi cenderung mengabaikan kompleksitas situasi dan perspektif dari kelompok lain.

Implikasi Sosial dan Praktis

Implikasi sosial dan praktis dari strategi eksklusi dan inklusi dalam wacana media memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan persepsi publik, stigma sosial, dan dinamika sosial masyarakat. Bagian ini membahas dampak-dampak tersebut dengan mengacu pada temuan dalam berita razia kamar kos dan mendukungnya melalui literatur terkini.

1. Penguatan Stigma Sosial

Salah satu implikasi paling jelas dari strategi eksklusi adalah penguatan stigma terhadap kelompok tertentu. Dalam berita ini, pasangan yang tertangkap digambarkan sebagai pelanggar norma moral tanpa adanya eksplorasi identitas atau motivasi mereka.

Dampak Stigma Sosial

- a. **Marginalisasi Individu:** Representasi pasangan yang tertangkap melalui asimilasi dan pasivasi menciptakan stigma moral yang mengisolasi mereka dari masyarakat. Hatzenbuehler (2016) mencatat bahwa stigma yang dilembagakan melalui narasi media dapat memperburuk tekanan psikologis, termasuk kecemasan dan depresi.
- b. **Pembentukan Narasi Moral Absolut:** Dengan menampilkan pasangan ini secara kolektif sebagai pelanggar, media membentuk narasi moral yang hitam-putih. Seperti yang diungkapkan oleh Inglis et al. (2019), narasi semacam ini memperkuat pandangan publik yang memosisikan kelompok tertentu sebagai "salah" tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau individual.

2. Legitimasi dan Penguatan Otoritas

Strategi inklusi yang menonjolkan peran polisi memberikan legitimasi terhadap tindakan mereka sebagai penegak norma kesusilaan. Namun, legitimasi ini juga dapat memunculkan tantangan sosial tertentu.

Dampak pada Legitimasi Otoritas

- a. **Penguatan Hierarki Kekuasaan:** Dengan memberikan nominasi dan determinasi kepada polisi, narasi ini menciptakan kesan bahwa otoritas mereka tidak dapat dipertanyakan. Machin dan Mayr (2012) menyatakan bahwa legitimasi semacam ini dapat menghambat kritik terhadap pendekatan atau metode yang digunakan oleh otoritas.
- b. **Reduksi Akuntabilitas:** Representasi positif yang berlebihan terhadap polisi dapat mengabaikan kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang tidak proporsional dalam razia.

3. Peran Masyarakat dalam Penegakan Norma

Masyarakat dalam berita ini diasosiasikan secara positif sebagai mitra polisi dalam menjaga moralitas. Namun, narasi ini juga memiliki potensi implikasi negatif.

Dampak pada Solidaritas Sosial

- a. **Tekanan Sosial untuk Konformitas:** Asosiasi masyarakat dengan norma positif menciptakan harapan bahwa semua individu harus mematuhi norma yang sama. Hal ini, sebagaimana dicatat oleh Purtle et al. (2021), dapat memunculkan tekanan sosial untuk mengikuti norma meskipun norma tersebut tidak selalu relevan atau inklusif.
- b. **Eksklusi Terselubung terhadap Kelompok Minoritas:** Narasi yang menekankan peran masyarakat sebagai penjaga moralitas dapat secara tidak langsung mengesampingkan kelompok-kelompok yang mungkin memiliki perspektif berbeda tentang norma sosial, seperti pasangan non-konvensional atau kelompok minoritas lainnya.

4. Eksklusi Pemilik Kos dan Isu Sistemik

Pemilik kos dalam narasi ini tidak diberikan perhatian yang memadai, meskipun mereka memiliki peran potensial dalam mengatur penggunaan properti mereka.

Dampak pada Regulasi Properti

- a. **Minimnya Pengawasan Sistemik:** Eksklusi pemilik kos dari narasi mengaburkan tanggung jawab mereka, yang dapat mengurangi urgensi untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap properti sewaan.
- b. **Fokus pada Individu, Bukan Sistem:** Narasi yang berfokus pada pasangan tertangkap mengalihkan perhatian dari kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan sistemik terhadap penyalahgunaan properti.

5. Pengaruh pada Kebijakan Publik

Narasi media seperti yang dianalisis memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan publik. Representasi yang bias dapat memperkuat pandangan moral absolut yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tidak inklusif.

Dampak pada Kebijakan

- a. **Kebijakan yang Diskriminatif:** Stigma terhadap pasangan tertangkap dapat memengaruhi kebijakan yang lebih represif terhadap kelompok tertentu, seperti kebijakan yang mengawasi kehidupan pribadi individu secara berlebihan.
- b. **Minimnya Perhatian pada Penyebab Struktural:** Fokus pada individu sebagai pelanggar norma dapat mengurangi perhatian pada penyebab struktural yang mendasari, seperti kurangnya akses pendidikan moral atau fasilitas publik yang mendukung.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bagaimana strategi eksklusi dan inklusi dalam wacana media membingkai narasi sosial dan moral yang memengaruhi persepsi publik. Pasangan yang tertangkap dan pemilik kos cenderung mengalami eksklusi melalui teknik seperti pasivasi, asimilasi, dan generalisasi, yang menghilangkan identitas individu serta tanggung jawab sistemik mereka. Di sisi lain, polisi dan masyarakat diberi sorotan positif melalui strategi nominasi, determinasi, dan asosiasi yang memperkuat legitimasi otoritas dan solidaritas sosial. Representasi ini menciptakan narasi moral yang sederhana, membagi masyarakat ke dalam kelompok "benar" dan "salah" tanpa mempertimbangkan kompleksitas konteks sosial. Implikasi dari strategi ini meliputi penguatan stigma sosial terhadap kelompok marginal, tekanan konformitas pada masyarakat, dan pengabaian terhadap tanggung jawab institusional. Oleh karena itu, media memegang peranan penting dalam membangun narasi yang lebih inklusif dan adil untuk mendorong pemahaman yang holistik tentang norma sosial dan moralitas.

REKOMENDASI

Untuk mengurangi dampak negatif dari representasi bias dalam wacana media, diperlukan langkah-langkah berupa peningkatan literasi media pemerintah dan lembaga pendidikan harus menginisiasi program literasi media yang membantu masyarakat memahami bias dalam representasi media dan mengembangkan pemikiran kritis terhadap narasi yang disajikan. Regulasi media dan jurnalisme berimbang dimana media harus didorong untuk menerapkan prinsip jurnalisme berimbang dengan memberikan ruang bagi narasi alternatif, seperti pengalaman langsung kelompok marginal, tanpa mengorbankan akurasi dan objektivitas. Edukasi untuk pihak berwenang yakni seperti polisi dan pemilik kos perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek sosial dari norma

moral dan pentingnya pendekatan humanis dalam tindakan hukum. Kebijakan publik yang inklusif dimana pemerintah harus menyusun kebijakan publik berbasis bukti yang mempertimbangkan konteks sosial dan mencegah marginalisasi kelompok tertentu, termasuk dengan melibatkan suara kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan. Riset lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari strategi eksklusi dan inklusi dalam wacana media terhadap dinamika sosial, kebijakan publik, dan kesetaraan sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen pengampu mata kuliah Filsafat pendidikan atas ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kesempatannya memberikan peluang untuk penulis menjadi awardee Beasiswa Unggulan dan memberikan izin dalam melanjutkan studi melalui skema tugas belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Barry, C. L., McGinty, E. E., Pescosolido, B. A., & Goldman, H. H. (2014). Stigma, discrimination, treatment effectiveness, and policy: public views about drug addiction and mental illness. *Psychiatric Services*, 65(10), 1269-1272. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201400140>
- Bleich, E., Bloemraad, I., & Graauw, E. d. (2015). Migrants, minorities and the media: information, representations and participation in the public sphere. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 41(6), 857-873. <https://doi.org/10.1080/1369183x.2014.1002197>
- Chan, C. K. K. (2014). Gendered morality and development narratives: the case of female labor migration from indonesia. *Sustainability*, 6(10), 6949-6972. <https://doi.org/10.3390/su6106949>
- Eden, A., Daalmans, S., Ommen, M. v., & Weljers, A. (2017). Melfi's choice: morally conflicted content leads to moral rumination in viewers. *Journal of Media Ethics*, 32(3), 142-153. <https://doi.org/10.1080/23736992.2017.1329019>
- Hahn, L., Tamborini, R., Prabhu, S., Grall, C., Novotny, E., & Klebig, B. (2022). Narrative media's emphasis on distinct moral intuitions alters early adolescents' judgments. *Journal of Media Psychology*, 34(3), 165-176. <https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000307>
- Hatzenbuehler, M. L. (2016). Structural stigma: research evidence and implications for psychological science. *American Psychologist*, 71(8), 742-751. <https://doi.org/10.1037/amp0000068>
- Hildebrandt, T. and Bode, L. (2019). Responsibilization and sexual stigma under austerity: surveying public support for government-funded prep in england. *Sexuality Research and Social Policy*, 17(4), 643-653. <https://doi.org/10.1007/s13178-019-00422-z>
- Inglis, G., McHardy, F., Sosu, E., McAteer, J., & Biggs, H. (2019). Health inequality implications from a qualitative study of experiences of poverty stigma in scotland. *Social Science & Medicine*, 232, 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.033>
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. London: Routledge.
- Lee, T. K. and Shapiro, M. A. (2014). The interaction of affective dispositions, moral judgments, and intentionality in assessing narrative characters: *rationalist and intuitionist sequences*. *Communication Theory*, 24(2), 146-164. <https://doi.org/10.1111/comt.12031>
- Machin, D., & Mayr, A. (2012). *How to Do Critical Discourse Analysis: A Multimodal Introduction*. London: Sage Publications.
- McGinty, E. E., Pescosolido, B. A., Kennedy-Hendricks, A., & Barry, C. L. (2018). Communication strategies to counter stigma and improve mental illness and substance use disorder policy. *Psychiatric Services*, 69(2), 136-146. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201700076>

- Morgan, C. and Lewis, R. (2017). Moral ambiguity in narratives decreases creative performance in highly creative people. *Journal of Creative Communications*, 12(2), 150-158. <https://doi.org/10.1177/0973258617708376>
- Nazir, U., Sulaiman, N., & Abid, S. K. (2021). Rise of digital humanitarian network (dhn) in southeast asia: social media insights for crisis mapping in disaster risk reduction (drr). *International Journal of Safety and Security Engineering*, 11(5), 573-583. <https://doi.org/10.18280/ijssse.110509>
- Purtle, J., Lê-Scherban, F., Wang, X. I., Shattuck, P., Proctor, E. K., & Brownson, R. C. (2019). State legislators' support for behavioral health parity laws: the influence of mutable and fixed factors at multiple levels. *The Milbank Quarterly*, 97(4), 1200-1232. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12431>
- Purtle, J., Nelson, K., & Gollust, S. E. (2021). Public opinion about adverse childhood experiences: social stigma, attribution of blame, and government intervention. *Child Maltreatment*, 27(3), 344-355. <https://doi.org/10.1177/10775595211004783>
- Rao, N. and Lingam, L. (2020). Smartphones, youth and moral panics: exploring print and online media narratives in india. *Mobile Media & Communication*, 9(1), 128-148. <https://doi.org/10.1177/2050157920922262>
- Rowe, E. and O'Brien, E. (2014). 'genuine' refugees or illegitimate 'boat people': political constructions of asylum seekers and refugees in the malaysia deal debate. *Australian Journal of Social Issues*, 49(2), 171-193. <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2014.tb00307.x>
- Sinpeng, A. and Koh, Y. (2023). Journalism in the age of digital autocracy: a comparative asean perspective. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 10(2). <https://doi.org/10.21512/jas.v10i2.9162>
- Sláma, M. and Hoesterey, J. B. (2021). Ambivalence, discontent, and divides in southeast asia's islamic digital realms: an introduction. *CyberOrient*, 15(1), 5-32. <https://doi.org/10.1002/cyo2.5>
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: Sage Publications.
- van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. Oxford: Oxford University Press.